

**IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP)
(Studi Pada Pembangunan Gedung Taman Kanak-Kanak Darmawanita di Desa
Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung)**

Desi Eka Cahyani

ABSTRAK

Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP). Program pembangunan gedung taman kanak-kanak di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung dilatar belakangi dari tidak adanya bangunan sekolah untuk taman kanak-kanak. Desa tersebut belum memiliki gedung untuk bersekolah sendiri karena selama ini mereka memakai gedung pertemuan PKK. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program pembangunan gedung taman kanak-kanak di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perdesaan (PNPM-MP). Program Pembangunan Gedung taman kanak-kanak ini dapat dikatakan cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh komunikasi yang dilakukan oleh pelaksana program dan aparat desa kepada masyarakat telah dilaksanakan dengan baik, sumber daya yang sudah cukup dan siap, serta sikap dan komitmen yang tinggi,serta pembangunan ini telah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Program pembangunan gedung taman kanak-kanak dapat menjadi alternative untuk anak-anak bersekolah yang layak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perdesaan (PNPM-MP). Program Pembangunan Gedung taman kanak-kanak ini dapat dikatakan cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh komunikasi yang dilakukan oleh pelaksana program dan aparat desa kepada masyarakat telah dilaksanakan dengan baik, sumber daya yang sudah cukup dan siap, serta sikap dan komitmen yang tinggi,serta pembangunan ini telah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Program pembangunan gedung taman kanak-kanak dapat menjadi alternative untuk anak-anak bersekolah yang layak.

Saran untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan pembelajaran yang dilakukan di TK Darmawanita ini.

Kata kunci : PNPM-MP, Implementasi, Pembangunan gedung Taman Kanak-kanak

**IMPLEMENTATION PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP)**
**(study on the construction of a kindergarten in Darmawanita village of Babadan
Karangrejo Sub district Tulungagung)**

Desi Eka Cahyani

ABSTRACT

Implementation Of The National Program Of Empowerment People Self-sufficient Rural (PNPM-MP). Development program building a kindergarten in the village of Babadan Karangrejo Subdistrict Tulungagung district exposed their lack of school buildings for kindergarten. The village has its own school building because this building they put on during the meetings of the PKK. This study aims to describe the implementation of the programme of construction of a kindergarten in the village of Babadan sub district Karangrejo Tulungagung district.

The results of this research indicate that the National Community Empowerment Program Self-sustaining rural (PNPM-MP). Development program Building a kindergarten can be good enough. This is demonstrated by the communication which is done by executing the program and the community has been to village authorities implemented properly, a resource that was enough and ready, as well as the attitude and high commitment, and this development has been carried out in accordance with SOP has been determined. Development program building a kindergarten can be an alternative for the children attending it deserves.

The results of this research indicate that the National Community Empowerment Program Self-sustaining rural (PNPM-MP). Development program Building a kindergarten can be good enough. This is demonstrated by the communication which is done by executing the program and the community has been to village authorities implemented properly, a resource that was enough and ready, as well as the attitude and high commitment, and this development has been carried out in accordance with SOP has been determined. Development program building a kindergarten can be an alternative for the children attending it deserves.

Expected to be utilized optimally for learning activities conducted in this darmawanita kindergarten.

Keywords: PNPM-MP, implementation, construction of kindergartens

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kemiskinan menurut Todaro (pengamat masalah sosial di Indonesia) mengatakan bahwa hal yang menyebabkan terjadinya kemiskinan adalah terjadinya pemerataan yang tidak seimbang, rendahnya perawatan sosial, kurang gizi, dan rendahnya tingkat pendidikan. Masalah kemiskinan dapat berdampak pada sebuah penurunan hajat hidup orang banyak karena masalah kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan masalah tentang rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi melainkan berkaitan dengan partisipasi dalam tujuan untuk membangun sebuah bangsa yang lebih baik. Untuk itu, peranan masyarakat sebagai sumber daya manusia generasi penerus bangsa sangatlah penting demi mewujudkan cita-cita pembangunan bangsa.

Pembangunan merupakan rangkaian dari kegiatan yang berlangsung secara terus menerus karena pembangunan merupakan suatu usaha untuk menuju keadaan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Pembangunan yang dilakukan oleh suatu bangsa dilaksanakan dalam berbagai bidang meliputi bidang ideologi, ekonomi, sosial budaya, politik, seta pertahanan dan keamanan.

Bidang-bidang tersebut memiliki peran yang sangat besar bagi kemajuan Negara. Misalnya dalam pembangunan bidang sosial budaya yang menyangkut tentang perubahan dalam berbagai segi kehidupan termasuk cara befikir, cara bekerja, dan lain sebagainya. Perubahan dalam bidang sosial budaya yang diperlukan dalam menghadapi kemajuan di era globalisasi ini adalah bersumber dari sumber daya manusia yang produktif dan cerdas. Perubahan itu dapat dilakukan melalui pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya.

Bentuk pembangunan secara substantif mengandung unsur proses dan adanya suatu perubahan yang direncanakan untuk mencapai kemajuan masyarakat, karena ditujukan untuk masyarakat itulah maka sewajarnya masyarakatlah yang menjadi pemilik kegiatan pembangunan. Hal ini dimaksudkan supaya perubahan yang hendak dituju adalah perubahan yang diketahui dan sebenarnya dihendaki oleh masyarakat. Perlu ada kesiapan dari masyarakat untuk menghadapi dan menerima perubahan tersebut untuk itu keterlibatan masyarakat dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pemanfaatannya, sehingga proses pembangunan yang dijalankan dapat memberdayakan masyarakat, bukan memperdayakan.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang digunakan dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan secara terpadu dan berkelanjutan khususnya di perdesaan. Dalam PNPM mandiri perdesaan dirumuskan kembali upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi serta pelestarian (sumber: buku pedoman PNPM-MP).

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang merupakan induk dari PNPM Mandiri Perdesaan yang telah dimulai sejak tahun 2007. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan, berdasarkan Peraturan Presiden nomor 13 tahun 2009 tentang koordinasi penanggulangan kemiskinan. PNPM Mandiri Perdesaan adalah lanjutan dari Program Pengembangan Kecamatan (PKK) dengan adanya program PKK ini tercipta lapangan pekerjaan bagi masyarakat

miskin. Upaya pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat dalam kerangka PNPM Mandiri, termasuk PNPM Mandiri perdesaan, pembangunannya diperluas sampai daerah-daerah terpencil dan terisolir. Efektivitas dan efisiensi dari kegiatan yang selama ini sering dijalankan bersama antar proyek diharapkan dapat diwujudkan, proses pemberdayaan umumnya membutuhkan waktu 5-6 tahun sehingga PNPM Mandiri akan dilaksanakan sekurang-kurangnya sampai pada tahun 2015 (sumber: buku pedoman PNPM-MP).

Salah satu program PNPM Mandiri Perdesaan adalah bidang pendidikan oleh karena itu, pemerintah memberikan bantuan untuk pendidikan yang dimulai dari taman kanak-kanak. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi suatu bangsa, karena perkembangan dan kemajuan sebuah bangsa dapat diukur dari tingkat dan kualitas pendidikan serta tingkat sumber daya manusia. Dengan adanya pendidikan disuatu bangsa tentu dapat mempengaruhi harkat dan martabat sebuah bangsa dimata dunia. Begitu juga dengan bangsa Indonesia, sebuah harkat dan martabat Indonesia dimata dunia sangat dipengaruhi oleh pendidikan dari penduduknya. Maka dari itu, dalam rangka untuk

meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia tidak henti-hentinya berupaya agar penduduknya dapat mengenyam pendidikan yang layak.

Desa Babadan merupakan satu dari desa di Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung yang mendapat bantuan dana dari PNPM Mandiri Perdesaan. Bantuan dana PNPM Mandiri Perdesaan digunakan untuk membangun gedung belajar bagi murid taman kanak-kanak, karena di desa Babadan Kecamatan Karangrejo ini belum memiliki gedung sekolah untuk taman kanak-kanak.

Desa babadan merupakan salah satu desa yang melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), dan memiliki jumlah masyarakat miskin atau RTSM paling banyak. Desa Babadan memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.126 Kepala Keluarga (KK), dan 159 KK termasuk masyarakat miskin, sebagian besar mata pencaharian masyarakat adalah petani dan buruh tani dengan jumlah pendapatan yang cukup rendah (sumber: RPJMDes tahun 2010).

Terkait dengan adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) bidang pendidikan di Kecamatan Karangrejo khususnya di Desa Babadan

perlu adanya tanggung jawab dari pihak-pihak yang terlibat agar dalam pelaksanaan program tersebut dapat menjangkau *target group* atau kelompok sasaran yang tepat dan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan oleh pemerintah.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri bidang pendidikan yang ada di Desa Babadan, dengan judul “Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu bagaimana Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM) di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM) di

Desa Babadan Kecamatan
Karangrejo Kabupaten
Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan masukan bagi pengembangan teori-teori Administrasi Negara khususnya pada kajian tentang implementasi kebijakan publik

2. Manfaat Praktis

a. Bagi instansi
Instansi pelaksana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) bidang pendidikan agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan

b. Bagi Universitas Negeri Surabaya
Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan referensi dalam rangka menambah dan melengkapi kajian tentang implementasi kebijakan publik

c. Bagi mahasiswa
1. Dapat menambah pengetahuan penelitian tentang implementasi kebijakan publik sehingga dapat menambah ketrampilan sebagai bekal untuk terjun ke masyarakat

2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang terkait dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) bidang pendidikan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan Publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Kebijakan publik menurut Dye dalam Islamy (2007 : 188) adalah “apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah mempunyai kewenangan untuk membuat suatu kebijakan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat, namun demikian hendaknya kebijakan tersebut mempunyai tujuan serta tindakan yang jelas dari pemerintah bukan semata-mata keinginan pejabat pemerintah belaka.

B. Implementasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan.

Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

2. Proses Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa suatu kebijakan tidak akan ada begitu saja melainkan melalui proses ataupun tahapan yang cukup panjang. Menurut Darwin dalam Widodo (2011 : 89) persiapan proses implementasi yang perlu dilakukan setidaknya terdapat empat hal penting, yaitu pendayagunaan sumber, pelibatan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, interpretasi, manajemen program, penyediaan

layanan dan manfaat pada publik.

3. Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan publik

Unsur-unsur dalam sebuah implementasi kebijakan merupakan faktor penting. Dengan kata lain dalam mengimplementasikan kebijakan publik harus ada unsur-unsur sebagai sarana sehingga dihasilkan implementasi yang efektif. Unsur-unsur penting tersebut menurut Abdullah dan Smith (Tachjan, 26 : 2006) yaitu unsur pelaksana (*implementor*), adanya program yang akan dilaksanakan, dan *target group*.

a. Unsur pelaksana

Pihak yang utama mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kebijakan publik adalah unit-unit administratif atau unit-unit birokratik pada setiap tingkat pemerintah.

b. Adanya program yang akan dilaksanakan

Kebijakan administrasi yang masih berupa pernyataan-pernyataan umum yang berisikan tujuan, sasaran, serta berbagai macam sarana agar dapat diimplementasikan tersebut perlu dijabarkan kembali kedalam program-

program yang bersifat operasional. Yang dimaksud dengan program bersifat operasional adalah program yang isinya mudah, dapat difahami dan dilaksanakan oleh pelaksana.

c. *Target Groups*

Target groups (kelompok sasaran) yaitu “sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang dan jasa atau yang akan dipenagruhi perilakunya oleh kebijakan” (Tachjan, 2006:35).

4. Model Implementasi Kebijakan Publik

Model implementasi yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis implementasi program yang ada yaitu dengan mengarah pada model implementasi George C. Edward III. Model ini berfungsi untuk menganalisis sejauh mana keberhasilan yang dicapai suatu program, dalam hal ini adalah Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam implementasi kebijakan publik.

Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward III menekankan model implementasi

publiknya dengan *Direct and Indirect on Implementation*.

Pendekatan model tersebut berupa variabel-variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan analisis teori Edward III karena variabel yang dikemukakan oleh Edward sesuai dengan permasalahan pada implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung.

Permasalahan yang terjadi pada implementasi program PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Babadan adalah pada aspek komunikasi dan disposisi. Pada aspek komunikasi yaitu kurangnya sosialisasi dari pihak pelaksana program PNPM Mandiri untuk menginformasikan program PNPM Mandiri Perdesaan bidang pendidikan kepada masyarakat. Sedangkan pada aspek disposisi yaitu peserta program PNPM Mandiri (warga miskin) membutuhkan waktu lama dalam memberikan pelayanan kepada peserta program.

Adanya permasalahan tersebut, digunakan teori George Edward III

untuk menganalisis implementasi program PNPM Mandiri Perdesaan Bidang Pendidikan di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung. Variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sebagaimana telah disebutkan akan mempengaruhi tingkat keberhasilan dan kegagalan implementasi suatu kebijakan publik.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini akan difokuskan pada program pembangunan taman kanak-kanak di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung menurut variabel komunikasi, variabel sumber daya, variabel disposisi, variabel struktur birokrasi. Sedangkan data penelitian diperoleh dari sumber

data primer, yaitu keterangan dan fakta dari informan, dan sumber data sekunder, yaitu dokumen pendukung penelitian yang kemudian dikumpulkan oleh instrumen penelitian, yaitu peneliti sendiri melalui teknik wawancara, observasi, dan teknik dokumentasi. Setelah data terkumpul dianalisis dengan pendekatan kualitatif model interaktif Miles dan Huberman.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

B. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Wilayah

Desa Babadan adalah sebuah desa di Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung Propinsi Jawa Timur Indonesia. Terletak kurang lebih 10 km utara kota Tulungagung. Desa Babadan terbagi atas dua wilayah, yaitu wilayah utara dan selatan. Wilayah utara terdiri dari satu dusun yaitu dusun Babadan utara sedangkan wilayah selatan terdiri dari tiga dusun yaitu dusun Setonobendo, Persilan dan Pereng. Desa Babadan Mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara Desa Tanjungsari dan Desa ngluntung

- b. Sebelah Selatan Desa Bungur
- c. Sebelah Barat Desa Kedoya
- d. Sebelah Timur Desa Sukowiyono dan Sukowidodo

Luas wilayah Desa Babadan sekitar 333,111 Ha

2. Struktur Pemerintahan Desa dan Tupoksi

Segala bentuk penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pemerintah Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung.

3. Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Program Pembangunan Gedung Taman Kanak-Kanak Darmawanita di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung.

- a. Deskripsi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) menurut pedoman umum adalah merupakan program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.

Adapun dasar hukum pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan menurut

pedoman umum mengacu pada landasan idiil Pancasila, dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta landasan khusus pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan yang akan disusun kemudian. Peraturan perundang-undangan khususnya terkait sistem pemerintahan, perencanaan, keuangan Negara, dan kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerinah Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulan Kemiskinan;

4. Model Implementasi

Keberhasilan implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Pembangunan sekolah taman kanak-kanak di Desa Babadan ini dilihat berdasarkan variabel dari Model Implementasi George C. Edward III. Adapun penjelasan selengkapnya sebagai berikut:

a. Variabel Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan dengan sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tujuan dan manfaat dari program yang akan dilaksanakan agar semua warga masyarakat tahu, mengerti dan paham tentang

program yang dilaksanakan seperti yang dijelaskan oleh ibu anik selaku TPU, yaitu:

Sosialisasi itu dilaksanakan dengan memberikan informasi terlebih dahulu kepada masyarakat tentang apa tujuan dan manfaat yang diperoleh dari program agar masyarakat mengetahui dan paham dari program tersebut dan Alhamdulillah mbk masyarakat mengerti dan paham tentang program tersebut dan mereka sangat antusias serta mau untuk terlibat dalam pelaksanaan pembangunan (wawancara pada tanggal 18 februari 2014).

b. Variabel Sumber Daya

Sumber daya dalam pelaksanaan PNPM-MP program pembangunan gedung taman kanak-kanak di Desa Babadan ini terdiri sumber daya manusia, sumber daya informasi, sumber daya keuangan dan sumber daya peralatan. Sumber daya manusia dalam pelaksanaan PNPM-MP program pembangunan gedung taman kanak-kanak di Desa Babadan ini melibatkan seluruh anggota masyarakat desa dalam pelaksanaan program. Hal tersebut ditegaskan oleh Bapak Bibit selaku KPMD, yaitu :

Sumber daya dari pelaksanaan program pembangunan ini lebih memanfaatkan masyarakat dalam desa atau masyarakat local sebagai pelaku utama dan masyarakat umum karena masyarakat memiliki semangat yang besar untuk membangun ini (wawancara pada tanggal 18 februari 2014).

Sumber daya keuangan program pembangunan gedung taman kanak-kanak ini cukup karena selain berasal dari dana bantuan PNPM-MP sebesar Rp. 92.203.400,00 juga ada dana swadainya dari masyarakat desa babadan sebesar Rp. 9.796.500,00 pernyataan tersebut diperkuat oleh pendapat dari Bapak Bibit, sebagai berikut :

Kalau masalah keuangan sumber dananya ada dua unsur yang satu dari dana bantuan PNPM-MP dan yang kedua dari desa sendiri atau swadaya dari masyarakat (wawancara pada tanggal 18 februari 2014).

c. Variabel Disposisi

Pelaksanaan program pembangunan gedung taman kanak-kanak di Desa Babadan ini oleh masyarakat dilakukan sangat efektif, karena pembangunan sarana ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa dan sangat membantu dalam memberikan pendidikan kepada anak usia dini. Hal tersebut dapat dibuktikan oleh hasil wawancara dari Ibu Komariah selaku guru sebagai berikut :

Menurut saya efektif mbak, karena pembangunan gedung taman kanak-kanak ini sangat membantu dalam memerikan pendidikan, jadi sekarang tidak perlu meminjam gedung PKK lagi (wawancara pada tanggal 23).

d. Variabel Struktur Birokrasi

Pelaksanaan program pembangunan gedung taman kanak-kanak di Desa Babadan ini

adalah Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD). Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam pembangunan gedung taman kanak-kanak ini terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara sedangkan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) terdiri dari satu perempuan dan satu laki-laki unsure-unsur pelaksanaan tersebut mempunyai peran yang penting dalam pelaksanaan pembangunan gedung taman kanak-kanak mulai dari penentuan tujuan, analisis serta perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakan masyarakat, pelaksanaan kegiatan, pengawasan serta penilaian.

Struktur birokrasi pelaksanaan PNPM-MP program pembangunan ini selain dilihat dari SOP juga dilihat dari kewenangan dalam menjalankan tugas. Dalam hal ini kewenangan dalam menjalankan tugas para pelaksana program yang dapat menjalankan pekerjaan dengan baik sesuai dengan tugasnya masing-masing, seperti pernyataan-pernyataan dari pelaksana program dibawah ini :

Bapak Bibit selaku KPMD berpendapat tentang tugas dan peran beliau yaitu :

Saya disini berperan sebagai pendamping masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan PNPM-MP, seperti memfasilitasi pendapat dari masyarakat untuk dibawa ke musyawarah desa (wawancara pada tanggal 18 februari).

A. Pembahasan

Dalam pengimplementasian sebuah kebijakan harus terdapat unsur-unsur sebagai sarana sehingga dihasilkan implementasi yang efektif. Ada tiga unsure kebijakan yaitu :

1. Unsur pelaksana

Pelaksanaan pembangunan gedung taman kanak-kanak di Desa Babadan ini adalah Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD). Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam pembangunan gedung taman kanak-kanak ini terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Sedangkan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) terdiri dari satu perempuan dan satu laki-laki.

2. Program kegiatan

Pada pelaksanaan program PNPM-MP Desa Babadan mengusulkan atau mengajukan program gedung taman kanak-kanak untuk didanai. Penilaian usulan kegiatan yaitu lebih bermanfaat bagi masyarakat miskin, atau Rumah Tangga Miskin (RTM) berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan, dapat dikerjakan oleh masyarakat didukung oleh sumber daya yang ada dan memiliki potensi untuk berkembang dan berkelanjutan. Program pembangunan gedung taman kanak-kanak merupakan program yang telah dirancang oleh bidang ekonomi pembangunan yang memang usulan atau aspirasi dari masyarakat desa.

3. Target sasaran

kelompok sasaran dalam program pembangunan gedung taman kanak-kanak yaitu seluruh masyarakat desa babadan baik yang miskin, sednag maupun kaya. Perbedaan terdapat pada sumbangan swadaya masyarakat yang ditentukan dengan kemampuan miskin, sedang, kaya, RTM dalam hal ini ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan menurut George C. Edward III harus telah memenuhi beberapa variabel yang diantaranya adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam PNPM-MP program pembangunan gedung taman kanak-kanak di Desa Babadan kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung ini keempat di atas telah dipenuhi sehingga program pembangunan gedung taman kanak-kanak ini sudah dapat dikatakan berhasil.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Program Nasioanal Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Program Pembangunan Gedung Taman Kanak-Kanak Darmawanita merupakan program pemberdayaan masyarakat yang digunakan dalam upaya untuk meningkatkan tingkat pendidikan anak-anak usia dini yang perlu untuk mendapatkan pendidikan sejak masih kecil sehingga dapat meningkatkan

derajat pendidikan pada dewasa nanti.

Program Nasioanal Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Program Pembangunan Gedung Taman Kanak-Kanak Dharmawanita ini dapat dikatakan berhasil yang ditunjukkan oleh :

1. Komunikasi yang dilakukan oleh pihak pelaksana program dan aparat desa kepada masyarakat Desa Babadan yang telah melakukan dengan baik, transparan dan terbuka sehingga masyarakat tahu serta mengerti dan paham tentang program yang sedang dilaksanakan sehingga masyarakat setuju dan ikut berpartisipasi baik secara langsung yang berupa sumbangan fisik maupun sumbangan yang berupa non fisik yang membantu berlangsungnya pembangunan gedung taman kanak-kanak ini.
2. Sumber daya yang dibutuhkan didalam program ini dapat dikakatan cukup karena didukung dengan sumber daya yang cukup dan siap untuk melaksanakan program yang direncanakan sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya peralatan dan sumber daya informasi.
3. Disposisi dari pihak yang terkait didalam pelaksanaan

program pembangunan gedung taman kanak-kanak di Desa Babadan ini dapat dilihat dari bentuk partisipasinya yang tinggi yang ditanamkan oleh masyarakat dan respon yang baik diberikan masyarakat kepada program ini serta semangat yang tinggi dan loyalitas dari para pelaksana program yang dengan sukarela menjalankan tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab.

4. Pelaksanaan program pembangunan gedung taman kanak-kanak di Desa Babadan ini sudah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, SOP yang ditetapkan tersebut baik dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan benar-benar diikuti karena menghindari adanya pembatalan atau pemberhentian bantuan dana jika tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Para pelaku program di Desa Babadan ini sudah dapat menjalankan tugas, peran dan fungsinya sesuai dengan jabatan yang dimilikinya masing-masing sehingga pekerjaan yang mereka kerjakan sesuai dengan jabatan sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pekerjaan.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan penulis didalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Program Pembangunan Gedung Taman Kanak-kanak Darmawanita, yaitu :

- Diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan pembelajaran yang dilakukan di TK Darmawanita ini.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2006. Dasar dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi VI. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Bungin, Burhan. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Harsono, Hanifah. 2002. Implementasi Kebijakan dan politik. Yogyakarta: Rhinheka Rasa.

Idrus, Muhammad. 2007. Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: UII Press.

Islamy, M. Irfan. 2007. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Moleong, Lexy, J. (2005). Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.

Setiawan, Guntur. 2004. Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan. Yogyakarta: pustaka Pelajar.

Soenarko, H. 2000. Public Policy: Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah. Surabaya: Airlangga University press.

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Tangkilisan, Hassel Nogi. 2003. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: Media Persada.

Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia).

Usman, Nurdin. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kuikulum. Semarang: CV. Obor Pustaka

Widodo, Joko. 2011. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Banyumedia Publishing.

Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik: Teori Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta CAPS